

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Asmawati *et al.* (2018) meneliti kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pemerintah desa Dore dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dapat dikatakan tidak optimal, dari keseluruhan indikator kinerja yang digunakan yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas, hanya satu faktor yang mencerminkan kinerja baik Pemerintah Desa Dore. Empat faktor lainnya mengalami masalah dan belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana desa pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Wardani dan Andriyani (2017) meneliti pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan teori yang mengatakan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha keuangan pada perangkat desa yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan adalah benar, karena dengan jumlah yang cukup serta memiliki latar pendidikan akuntansi, maka

perangkat desa yang bekerja akan dapat menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan tepat dan baik.

Martini *et al.* (2019) menguji sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Hasilnya adalah variabel lingkungan pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, variabel penilaian risiko secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, variabel kegiatan pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, variabel informasi dan komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, variabel pemantau secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terfokus pada pengendalian internal sebagai faktor yang mempengaruhi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah menguji pengendalian internal yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Menurut Mulyadi (2016 : 129) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengordinasikan kekayaan organisasi, mengontrol ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong adanya efisiensi dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen yang berlaku di perusahaan. Adapun tujuan dari sistem pengendalian internal dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Pengendalian intern akuntansi, yaitu pengendalian untuk mengontrol ketelitian dan keandalan data akuntansi, pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan bagi para investor dan kreditur yang menanamkan saham di perusahaan, serta nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
- b. Pengendalian administrator, yaitu pengendalian yang mampu mendorong terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam berjalannya operasional perusahaan. Sehingga terciptanya pematuhan kebijakan-kebijakan dalam manajemen oleh semua karyawan yang terlibat dalam perusahaan.

Unsur- unsur dalam pengendalian internal terdiri dari 4 unsur pokok menurut (Mulyadi, 2016 : 130), antara lain :

- a. Stuktur organisasi dalam perusahaan yang dipisah tanggung jawabnya secara tegas dan terinci.

- b. Sistem wewenang, serta prosedur pencatatan yang mampu memberikan perlindungan yang terpercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, serta biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas-tugas, serta fungsi setiap unit organisasi. Kinerja di suatu organisasi dikatakan telah memenuhi kriteria praktik yang sehat, jika :

- 1) Karyawan mampu melindungi aset yang dimiliki dan digunakan untuk keperluan bisnis
- 2) Informasi bisnis akurat yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di organisasi

- d. Karyawan yang memiliki mutu sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa telah diatur di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan Pengelolaan Dana Desa meliputi, yaitu :

a. Perencanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 yang mengatur tentang perencanaan pengelolaan dana desa, yaitu :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa, yaitu :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 yang mengatur tentang penatausahaan pengelolaan dana desa, yaitu :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37 yang mengatur tentang pelaporan pengelolaan dana desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) laporan semester pertama; dan

- b) laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, yaitu :

 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

